

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti tercantum dalam perencanaan jangka panjang. Sehingga peran serta dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta sangatlah diharapkan demi tetap terjaganya kesinambungan pembangunan.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah penyelenggara upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu usaha kesejahteraan umum dari tujuan nasional.

Pembangunan kesehatan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, karena kesehatan menyentuh hampir semua kehidupan manusia. Pembangunan kesehatan ini sangat terkait dengan aspek demografi, keadaan ekonomi masyarakat dan juga termasuk tingkat pendidikannya serta perkembangan lingkungan sekitar. Namun hingga saat ini tingkat kesehatan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Ini

dikarenakan banyak faktor diantaranya tingkat gizi penduduk yang masih rendah, tempat pelayanan kesehatan masih kurang dan mutu yang masih rendah.

Adapun tujuan dari pembangunan kesehatan adalah untuk menciptakan masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai dengan penduduk yang hidup sehat, adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh Indonesia.

Terwujudnya keadaan sehat adalah kehendak semua pihak tidak hanya oleh orang per orang tetapi juga oleh keluarga, kelompok dan bahkan oleh masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan keadaan sehat tersebut banyak hal yang perlu dilakukan, salah satunya dinilai mempunyai peranan cukup penting adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Blum 1974, dalam Azrul Azwar 1996:1).

Komoditi pelayanan kesehatan dapat dipandang dari dua sisi yaitu permintaan dan penawaran, dimana sisi permintaan mencerminkan tentang derajat kesehatan-kesehatan pasien/masyarakat. Permintaan pelayanan kesehatan di negara-negara berkembang yang berpendapatan rendah permintaan akan elastis terhadap harga, ini berarti ada penurunan harga akan mengakibatkan meningkatnya penggunaan jasa pelayanan kesehatan. Sedangkan sisi penawaran mencerminkan apa yang disediakan (pelayanan kesehatan) oleh penyedia pelayanan kesehatan dan lebih mengutamakan profit.

Pembangunan kesehatan sebagai upaya pemenuhan mutu pelayanan kesehatan.

Pemerintah mendirikan badan atau lembaga yang bertanggung jawab atas keberhasilan kinerja pelayanan publik di setiap provinsi, ibukota provinsi dan di

setiap kabupaten daerah otonom yang memiliki badan pemerintah dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelayanan kesehatan di provinsi tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah pusat melalui Departemen Kesehatan RI menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1475/MENKES/SK/X/2003 Tentang Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (KW/SPM) Bidang Kesehatan. Sejak disusunnya Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada tahun 2003 dan mulai diberlakukan/pelaksanaannya pada tahun 2004 pemerintah kabupaten/kota wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM. SPM sebagaimana dimaksud berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahun 2010 yaitu Menuju Indonesia Sehat 2010.

SPM adalah suatu standar dengan batas-batas untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator dan nilai.

Urusan wajib dan SPM dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu :

1. Menyelenggarakan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan.
3. Pemerataan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI.
4. Kabupaten/kota melakukan urusan wajib dibidang kesehatan dengan menyelenggarakan SPM Bidang Kesehatan.

Adapun tujuan strategis yang terkait SPM Bidang Kesehatan adalah :

1. Terbangunnya komitmen antara pemerintah, legislatif serta masyarakat guna kesinambungan pembangunan kesehatan.
2. Terlindungnya kesehatan masyarakat khususnya penduduk miskin, kelompok rentan dan daerah miskin.
3. Terwujudnya komitmen nasional dan global dalam program kesehatan.

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota provinsi yang diberikan wewenang menyelenggarakan SPM Bidang Kesehatan. Untuk mengetahui jumlah penduduk, luas wilayah serta kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2008.

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Teluk Betung Barat	20,54	53.790	2.618
2	Teluk Betung Selatan	8,63	108.836	12.611
3	Teluk Betung Utara	9,95	61.794	6.210
4	Panjang	23,99	82.331	3.431
5	Tanjung Karang Timur	21,1	65.458	3.102
6	Tanjung Karang Barat	17,43	80.067	4.593
7	Tanjung Karang Pusat	5,67	53.062	9.358
8	Kemiling	22,89	53.499	2.337
9	Kedaton	8,88	88.620	9.979
10	Rajabasa	13,02	31.968	2.455
11	Tanjung Seneng	12,62	28.865	2.287
12	Sukarame	16,87	65.659	3.892
13	Sukabumi	10,59	51.184	4.833
Jumlah		192,8	825.128	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung.

Sebagai daerah otonom dan ibukota provinsi, Kota Bandar Lampung memiliki luas daerah 192,8 km² dan terdiri dari 13 kecamatan dan dengan jumlah penduduk

825.128 jiwa, tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sebagian besar masyarakat Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat dan SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan daerah. Adapun data mengenai SPM dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Disediakan Puskesmas di Kota Bandar Lampung.

No	Jenis Pelayanan	Indikator
1	Pelayanan Rawat Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Status - Medis - Puskesmas
2	Pelayanan Rawat Inap	<ul style="list-style-type: none"> - Pemonudukan - Paramedis - Perawatan Medis
3	Tindakan Unit Gawat Darurat (UGD)	<ul style="list-style-type: none"> - Tindakan Ringan - Tindakan Sedang
4	Pelayanan Medik Ringan	<ul style="list-style-type: none"> - Insisi abses - Insisi Hordilium - Sirkumsisi - Tindik Daun Telinga - Pemasangan IUD - Pencabutan IUD - Pemasangan Implant - Pencabutan Implant - Vasektomi - Kesehatan Ibu dan Bayi - Pengendalian Vektor - Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio - Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA - Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) - Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare
5	Pelayanan Medik Gigi	<ul style="list-style-type: none"> - Radang Gusi dan Mulut - Penambahan Amalgan - Penambalan Komposit - Pencabutan Gigi Dewasa - Pencabutan Gigi Anak - Pencabutan Gigi Tertanam
6	Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Darah - Pemeriksaan Urin - Proteinuria - Tes Kehamilan - Penyakit Kelamin - Pap Smer - Pemeriksaan Sputum/Dahak - Pemeriksaan Laboratorium Air - Pemeriksaan KIA
7	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - KIR Pemeriksaan Umum - Visum et Repertum

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Salah satu sarana untuk dapat memantau dan mengevaluasi pencapaian 7 jenis pelayanan SPM Bidang Kesehatan di Kota Bandar Lampung, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menetapkan target untuk masing-masing puskesmas yang berada di Kota Bandar Lampung dan telah mengevaluasi.

Adapun data mengenai target dan capaian dari 7 indikator SPM Bidang Kesehatan yang dianalisis oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung untuk masing-masing puskesmas di Kota Bandar Lampung tahun 2004-2008 dapat dilihat pada Tabel 3.